



Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

2023/03/15

Jalan Aliyanyang No. 7B Pontianak

Telp. 0561-8102060, 08115700460

Fax 0561-764782

Email: disperpusip@pontianak.go.id

Webiste: [http//disperpusip.pontianak.go.id](http://disperpusip.pontianak.go.id)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa Syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmatNya, kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2024-2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah atau pedoman rencana tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak selama tahun 2024, dan Rencana Kerja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, atau permasalahan serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pontianak, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PONTIANAK,**

RENDRAYANI, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780624 199703 2 004



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 14 |
| 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 16 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 21 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 29 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 34 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 34 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 36 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 39 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK | 46 |
| BAB V PENUTUP | 56 |

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2024-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap

tahun.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan Tiga tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan bersifat indikatif. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi Dinas Perpustakaan Tahun 2024-2026 yaitu **“Terwujudnya Keunggulan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan”**.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
2. Mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.
3. Melaksanakan pelayanan prima pada bidang perpustakaan dan kearsipan.
4. Menumbuhkan budaya gemar membaca dan sadar arsip melalui promosi dan kerjasama.
5. Melaksanakan Pembinaan perpustakaan dan kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undnag-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 11. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 12. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah RPJMD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD;
27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perpustakaan;
30. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Pontianak.
31. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Startegis Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan serta

perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
- b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
- c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2024;
- d. Diperolehnya program/ kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak di tahun 2014 guna mewujudkan target dari visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran Tabel

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022*

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Pontianak tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk belanja operasi sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp **8.723.115.536,00,-** (delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh enam) dipergunakan untuk membiayai 3 Program, 11 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan dalam pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Perpustakaan Kota Pontianak tahun 2022 yaitu sebesar Rp. **8.481.605.656,00,-** (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus lima puluh enam), jadi secara umum untuk realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar **97,23%**.

b. *Evaluasi Capaian Renstra*

Review hasil pelaksanaan Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dilihat sebagai berikut :

- a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan;

Dari 3 Program, 11 kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai 100 % sampai dengan Desember 2022 meliputi :

- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran yang terealisasi mencapai 96,97 %;
- Program Pembinaan Perpustakaan, anggaran yang terealisasi mencapai 98,49 %;
- Program Pengelolaan Arsip. Anggaran yang terealisasi mencapai 99,16

%

- b) Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Program/kegiatan yang telah memenuhi target diatas 95% adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar 96,97%.
- Program Pembinaan Perpustakaan realisasi sebesar 98,49%.
- Program Pengelolaan Arsip realisasi sebesar 99.16%.

- c) Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

- Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar 100%.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi sebesar 96,67%.
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi sebesar 98,62 %.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi sebesar 98,54 %.
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi sebesar 99,90 %.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi sebesar 97,94 %.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 99,72 %.
- Kegiatan pada Program Pembinaan Perpustakaan yaitu:
 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar 98,17 %.
 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar 100 %.
- Kegiatan pada Program Pengelolaan Kearsipan yaitu:
 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar 98,53 %.
 2. Pengelolaan Arsip Statis, realisasi sebesar 99,76 %.

- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/ kegiatan:

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target 100 % adalah :

- Adanya ASN PNS yang pensiun sehingga terdapat sisa anggaran gaji dan TPP Tahun 2022.
- Ada refocusing anggaran pada Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.
- Adanya efisiensi tagihan rutin (listrik, telpon, air, dan internet).
- Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah Program dan kegiatan direncanakan dengan tepat dan dilakukan evaluasi dan pengendali
- Perkiraan capaian tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2022.
- Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan capaian kinerja.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra s/d tahun Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pontianak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-206 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---------|---|--|---|--|
| | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | 8=(7/6) | 9 | | 10=(5+7+9) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | Non Urusan | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 | Persen | | | | | | | |
| 1 01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 | Persen | | | | | | | |
| | 01 1 | <i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i> | 24 | dokumen | | | | | | | |
| | 02 2 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i> | 3 | dokumen | | | | | | | |
| | 3 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA</i> | 3 | dokumen | | | | | | | |
| | 03 4 | <i>Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i> | 19 | laporan | | | | | | | |
| 1 02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 | persen | | | | | | | |
| | 5 | <i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i> | 43 | orang | | | | | | | |
| | 01 6 | <i>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD</i> | 1 | dokumen | | | | | | | |
| | 02 7 | <i>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD</i> | 21 | dokumen | | | | | | | |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 | persen | | | | | | | |
| | 01 8 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> | 6 | paket | | | | | | | |
| | 02 9 | <i>Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i> | 15 | orang | | | | | | | |
| 1 04 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah | 100 | persen | | | | | | | |
| 1 06 01 | 10 | <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</i> | 3 | paket | | | | | | | |
| | 02 11 | <i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i> | 3 | paket | | | | | | | |
| | 03 12 | <i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i> | 3 | paket | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-206 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 04 | 13 | Penyediaan bahan logistik kantor | jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan | 3 | paket | | | | | |
| 1 | 07 | 01 | 14 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 3 | paket | | | | |
| | | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 | paket | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 16 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 18 | laporan | | | | |
| | | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | Persen | | | | |
| | | 01 | 17 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 168 | unit | | | | |
| | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | persen | | | | |
| | | 01 | 18 | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 | laporan | | | | |
| | | | 19 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 4 | laporan | | | | |
| | | | 20 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 | laporan | | | | |
| | | 02 | 21 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 | laporan | | | | |
| | | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | persen | | | | |
| | | 01 | 22 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 | unit | | | | |
| | | | 23 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 72 | unit | | | | |
| | | | 24 | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 | unit | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| | | | I. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | Ketercukupan koleksi perpustakaan | 150 | judul (300 eksemplar) | | | | |
| | | | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | 58.7 | persen | | | | |
| 2 | 01 | 01 | PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota | 100 | persen | | | | |
| | | | 25 | Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota | jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya | 18 | perpustakaan | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-206 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | 26 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan | jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 18 | perpustakaan | | | | | |
| | 27 | Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota | 120 | orang | | | | | |
| | 03 | 28 | Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 900 | eksemplar | | | | |
| | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota | 100 | persen | | | | | |
| | 30 | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat | jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | 6 | lokus | | | | | |
| | 31 | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota | 18 | orang | | | | | |
| | 32 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | 1 | perpustakaan | | | | | |
| 3 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | |
| | | | II. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat Ketersediaan Arsip | 76 | persen | | | | |
| | | | Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah, kelurahan, dan ormas | 100 | persen | | | | |
| | | 33 | Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | 62 | berkas | | | | |
| | 02 | 34 | Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis | jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | 62 | berkas | | | | |
| 3 | 02 | 01 | 35 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota | 30 | laporan | | | |
| | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota | 100 | persen | | | | |
| 3 | 03 | 36 | Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 15000 | arsip | | | | |
| | | | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak | 100 | persen | | | | |
| 4 | | 37 | Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN | jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN | 30 | pengguna | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-206 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | | |
|------|--|--|--|---|--|--|---------|---|---|--|--|--|
| | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | 8=(7/6) | 9 | | 10=(5+7+9) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | 70 | persen | | | | | | | | |
| | Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota | Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota | 100 | persen | | | | | | | | |
| | 38 Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip. | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 3 | arsip | | | | | | | | |
| | 39 Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | 3 | arsip | | | | | | | | |
| | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 | persen | | | | | | | | |
| | 40 Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun. | jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun | 900 | arsip | | | | | | | | |
| | 41 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun | jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan | 18 | berkas | | | | | | | | |
| | Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 | persen | | | | | | | | |
| | 42 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang. | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 3 | arsip | | | | | | | | |
| | 43 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 3 | arsip | | | | | | | | |
| | 44 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 3 | arsip | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada IKK Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Untuk lebih lengkapnya hasil analisis capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Pontianak

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Non Urusan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Survey Pelayanan Publik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| Urusan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat | | = Jumlah kunjungan ke Perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun | 80% | 82% | 85% | 85% | 249% | | 85% | 85 % | |
| Urusan Kearsipan | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Indeks kearsipan | | = (60% * nilai pengawasan eksternal) + (40% * nilai pengawasan internal) | B (Baik) | CC (Cukup) | CC (Cukup) | CC (Cukup) | C (Kurang) | | CC (Cukup) | B (Baik) | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusivitas daerah menuju Good Government. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Pontianak tahun 2024-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dituntut lebih humanis, antisipasi, responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan – perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis, sebagai berikut:

1. Kekuatan Internal

a. Adanya landasan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan; dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.

b. Lokasi perpustakaan dan depo arsip daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

c. Dukungan anggaran dari Pemerintah kota Pontianak.

2. Kelemahan Internal

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan keahlian: Pustakawan; Tenaga IT perpustakaan; Arsiparis, Tenaga IT Kearsipan.
- b. Kapasitas dan kualitas Gedung Layanan Perpustakaan dan depo arsip yang belum memadai.
- c. Belum efektifnya system data dan informasi yang akurat dan terintegrasi.

3. Tantangan eksternal

- a. Perpustakaan Nasional sedang mengembangkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi masyarakat;
- b. Adanya perubahan bobot penilaian dalam pengawasan kearsipan dengan peraturan ANRI Nomor 6 tahun 2019 di mana bobot pengawasan kearsipan menjadi 60% pengawasan eksternal dan 40 % pengawasan internal
- c. Adanya tuntutan dari Perpustakaan RI dalam hal penerapan program Indonesia Gemar Membaca, transformasi digital.
- d. Adanya tuntutan dari ANRI supaya daerah membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menuntut daerah untuk memberikan pelayanan dan informasi berbasis teknologi dan informasi.

4. Peluang

- 2.2.1. Perpustakaan Nasional telah membangun aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) transformasi perpustakaan sebagai media untuk melaporkan kegiatan pelibatan masyarakat, advokasi, publikasi, peningkatan layanan informasi dan laporan kunjungan perpustakaan pada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS);
- 2.2.2. ANRI telah menyiapkan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai sarana untuk mempermudah pengelolaan arsip dinamis.

Dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pendampingan serta pemantauan dalam pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melakukan identifikasi permasalahan yaitu

- 1) Permasalahan Bidang Urusan Perpustakaan, diantaranya:

- a. Masih rendahnya Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pontianak Tahun 2022 baru mencapai 51,82. Hal ini dikarenakan Belum meratanya Layanan Perpustakaan (UPLM 1), Terbatasnya koleksi buku pada perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan kelurahan/ kecamatan (UPLM 2), Masih kurangnya jumlah Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3),
- b. Kota Pontianak mendapatkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada pertengahan Tahun 2022. Program ini belum tersosialisasi secara optimal ke perpustakaan masyarakat serta belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan dengan stakeholder dalam rangka mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;

2) Permasalahan Bidang Urusan Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga merupakan data atau dokumen dalam bentuk apapun yang memiliki nilai historis, nilai hukum dan nilai kegunaan yang disimpan secara teratur dan sistematis agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat apabila diperlukan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Standar penyimpanan fisik arsip yaitu dapat menjamin dan

meningkatkan kualitas penyimpanan arsip, kapasitas ruang simpan arsip inaktif pada dasarnya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan instansi, penyimpanan dapat menggunakan rak konvensional (rak status, stationary stacks), dan dengan rak yang padat (compact, sheffing, roll o'pact, mobile stacks, rak bergerak).

Standar suhu dan kelembaban ruang simpan arsip tidak lebih dari 20 C dan kelembaban tidak lebih dari 50 %., dan kondisi lingkungan Tempat penyimpanan arsip jauh dari lokasi yang berbahaya, sesuai dengan retensi / jangka waktu simpan arsip, pencahayaan langsung terhadap arsip dihindarkan

Berdasarkan identifikasi permasalahan kearsipan di Kota Pontianak saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah belum memahami pengelolaan arsip dinamis yang harus dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pontianak, sehingga Nilai Indeks Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2022 memperoleh nilai C (kurang). Hal ini dikarenakan OPD belum melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik, belum melakukan pemeliharaan arsip yaitu menyusun daftar arsip; penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan daerah dan belum menggunakan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dengan ketentuan
- b. Gedung LKD belum sesuai standar sehingga layanan belum optimal, sehingga Standarisasi gedung Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan bangunan Lembaga Kearsipan Daerah LKD masih menyatu dengan Gedung Layanan Perpustakaan sehingga tidak dapat optimal dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang LKD.

Berikut tabel isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Tabel 2.3
Ringkasan Isus-Isu dari Tugas Fungsi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
Tahun 2022

| Faktor Yang ditinjau | Uraian | Isu-Isu |
|---|---|--|
| Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | Tugas Pokok: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan. | <ol style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan belum optimal. b. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan belum optimal. c. Manajemen kearsipan (pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip) belum optimal |
| Sasaran jangka menengah ANRI | Sasaran jangka menengah ANRI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Kearsipan. b. Pengelolaan Kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan arsip melalui digitalisasi arsip belum optimal. 2. Jumlah dan kompetensi arsiparis belum optimal. |
| Sasaran Jangka menengah Perpustakaan RI. | Sasaran jangka menengah PERPUSNAS RI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Peprustakaan dan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan budaya gemar membaca; b. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses maupun utilitas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jangkauan layanan perpustakaan masih terbatas. 2. Terbatasnya akses perpustakaan digital ke masyarakat. 3. Jumlah dan kompetensi pustakawan belum memadai. |
| Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak: 1. Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan 2. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah | Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 2. Indeks kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca, 2. Ketercukupan koleksi Perpustakaan 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat Ketersediaan Arsip 5. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban |

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Rancangan awal RKPD Kota Pontianak tahun **2024** telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 5 nomenklatur program dan 16 Kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Perpustakaan Kota Pontianak, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan;
 - 1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan, meliputi kegiatan:
 - 2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengelolaan Kearsipan, meliputi kegiatan;
 - 3.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota;
 - 3.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota;
 - 3.3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkatkab/kota;
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, meliputi kegiatan;
 - 4.1. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media kab/kota;
 - 4.2. Pemusnahan arsip dilindungi Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.
 - 4.3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/ kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan;

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|----------------|----------------------|----|--|----------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total | | | | 19,674,950,000 | | Total | | | | 19,674,950,000 |
| | Non Urusan | Kepala Dinas Perpustakaan | | | | | Non Urusan | Kepala Dinas Perpustakaan | | | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Sekretaris | Hasil penilaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah oleh inspektorat | BB (70-79) | 7,600,630,600 | 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Sekretaris | Hasil penilaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah oleh inspektorat | BB (70-79) | 7,600,630,600 |
| | | | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah oleh inspektorat | BB (70-79) | | | | | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah oleh inspektorat | BB (70-79) | |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | 33,400,000 | | PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | 33,400,000 |
| 1. | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 dokumen | 14,400,000 | 1. | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 dokumen | 14,400,000 |
| 2. | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen | 5,500,000 | 2. | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen | 5,500,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 5,500,000 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 5,500,000 |
| 3. | Evaluasi Kinerja perangkat | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 laporan | 8,000,000 | 3. | Evaluasi Kinerja perangkat | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 laporan | 8,000,000 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 persen | 6,400,341,000 | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 persen | 6,400,341,000 |
| 4. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 orang | 6,233,981,000 | 4. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 orang | 6,233,981,000 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|----|--|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 156,360,000 | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 156,360,000 |
| 5 | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 7 dokumen | 10,000,000 | 5 | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 7 dokumen | 10,000,000 |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 persen | 87,510,000 | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | 100 persen | 87,510,000 |
| 4 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 2 paket | 57,510,000 | 4 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 2 paket | 57,510,000 |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 5 orang | 30,000,000 | | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 5 orang | 30,000,000 |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah | 100 persen | 243,476,200 | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah | 100 persen | 243,476,200 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 14,008,200 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 14,008,200 |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | 50,339,200 | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | 50,339,200 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 paket | 20,000,000 | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 paket | 20,000,000 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan | 1 paket | 40,000,000 | | Penyediaan bahan logistik kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan | 1 paket | 40,000,000 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 46,128,800 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 46,128,800 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 13,000,000 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 13,000,000 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|----------------------------|--|----------------|----------------------|----|--|----------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 6 laporan | 60,000,000 | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 6 laporan | 60,000,000 |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | 150,000,000 | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | 150,000,000 |
| | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 56 unit | 150,000,000 | | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 56 unit | 150,000,000 |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 403,363,600 | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 403,363,600 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 laporan | 1,200,000 | | Penyediaan jasa surat menyurat | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 laporan | 1,200,000 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 4 laporan | 225,000,000 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 4 laporan | 225,000,000 |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 laporan | 10,000,000 | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 laporan | 10,000,000 |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 laporan | 167,163,600 | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 laporan | 167,163,600 |
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 282,539,800 | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 282,539,800 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 140,320,000 | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kasubbag.Umum dan Aparatur | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 140,320,000 |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 72 unit | 65,297,350 | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 72 unit | 65,297,350 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|----|--|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 unit | 76,922,450 | | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kasubbag.Umum dan Aparatur | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 unit | 76,922,450 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Kepala Dinas Perpustakaan | | | | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Kepala Dinas Perpustakaan | | | |
| 1 | I. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Kepala Bidang Perpustakaan | Ketercukupan koleksi perpustakaan | 150 judul (300 eksemplar) | 11,755,319,400 | 1 | I. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Kepala Bidang Perpustakaan | Ketercukupan koleksi perpustakaan | 150 judul (300 eksemplar) | 11,755,319,400 |
| | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | 36 persen | | | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | 36 persen | |
| | PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kepala Bidang Perpustakaan | Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota | 100 persen | 500,000,000 | | PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kepala Bidang Perpustakaan | Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota | 100 persen | 500,000,000 |
| | Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya | 6 perpustakaan | 219,069,400 | | Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya | 6 perpustakaan | 219,069,400 |
| | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 6 perpustakaan | 134,680,600 | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 6 perpustakaan | 134,680,600 |
| | Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota | 40 orang | 50,000,000 | | Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota | 40 orang | 50,000,000 |
| | Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 300 eksemplar | 96,250,000 | | Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 300 eksemplar | 96,250,000 |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Perpustakaan | Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota | 100 persen | 11,255,319,400 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Perpustakaan | Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota | 100 persen | 11,255,319,400 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------|-----|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | 6 lokus | 105,319,400 | | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | 6 lokus | 105,319,400 |
| | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota | 6 orang | 150,000,000 | | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota | 6 orang | 150,000,000 |
| | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | 1 perpustakaan | 11,000,000,000 | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | 1 perpustakaan | 11,000,000,000 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Kepala Dinas Perpustakaan | | | | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Kepala Dinas Perpustakaan | | | |
| 1 | II. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Kepala Bidang Kearsipan | Tingkat Ketersediaan Arsip | 74 persen | 291,000,000 | 1 | II. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Kepala Bidang Kearsipan | Tingkat Ketersediaan Arsip | 74 persen | 291,000,000 |
| | Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah, kelurahan, dan ormas | 32 persen | 177,000,000 | | Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah, kelurahan, dan ormas | 32 persen | 177,000,000 |
| ### | Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | 20 berkas | 85,000,000 | ### | Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | 20 berkas | 85,000,000 |
| ### | Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | 20 berkas | 32,000,000 | ### | Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | 20 berkas | 32,000,000 |
| ### | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota | 10 laporan | 60,000,000 | ### | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota | 10 laporan | 60,000,000 |
| | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota | 100 persen | 110,000,000 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota | 100 persen | 110,000,000 |
| ### | Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 5000 arsip | 110,000,000 | ### | Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 5000 arsip | 110,000,000 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|----|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak | 100 persen | 4,000,000 | | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak | 100 persen | 4,000,000 |
| | ### Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN | 10 pengguna | 4,000,000 | | ### Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN | 10 pengguna | 4,000,000 |
| 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Kepala Bidang Kearsipan | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | 50 persen | 28,000,000 | 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Kepala Bidang Kearsipan | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | 50 persen | 28,000,000 |
| | Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota | 100 persen | 6,500,000 | | Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota | 100 persen | 6,500,000 |
| | ### Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip. | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 1 arsip | 2,000,000 | | ### Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip. | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 1 arsip | 2,000,000 |
| | 57 Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | 1 arsip | 4,500,000 | | 57 Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | 1 arsip | 4,500,000 |
| | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 persen | 11,000,000 | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 persen | 11,000,000 |
| | Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun. | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun | 300 arsip | 6,000,000 | | Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun. | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun | 300 arsip | 6,000,000 |
| | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan | 6 berkas | 5,000,000 | | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun | Kepala Bidang Kearsipan | jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan | 6 berkas | 5,000,000 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | No | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|----|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 persen | 10,500,000 | | Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang | Kepala Bidang Kearsipan | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | 100 persen | 10,500,000 |
| | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang. | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1 arsip | 3,500,000 | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang. | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1 arsip | 3,500,000 |
| | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1 arsip | 3,500,000 | | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1 arsip | 3,500,000 |
| | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 1 arsip | 3,500,000 | | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Kepala Bidang Kearsipan | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 1 arsip | 3,500,000 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target indikator OPD pada Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan usulan kegiatan masyarakat tahun 2024. Usulan program dan kegiatan masyarakat para pemangku kepentingan diserap melalui aspirasi masyarakat yang tertampung dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai induk Kota.

Berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa usulan, yaitu:

:

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
Tahun 2024**

| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan | Keterangan |
|----------|--|--|---|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | | | Rp.0,- | | |
| | 1. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Seluruh RW di Kelurahan Sungaijawi, Kota Pontianak | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Diperlukan bantuan buku dan rak | Kampung KB RW. 38 Kel. Sungai Jawi |
| | 2. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Taman Bacaan RW.008 Kelurahan Banjar Serasan | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Perlu adanya bantuan Rak Buku, Buku-Buku, dan Komputer PC / Laptop | Belum ada Perpustakaan (masih rencana) |
| | 3. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | SDN 16 (belum Workshop), SDN 10 , Paud TP-PKK dan Forum Anak, Kelurahan Banjar Serasan | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Penambahan rak , Buku-buku, Laptop / Crome Book | Perpustakaan sekolah bisa di cover dari dana BOS |

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan | |
|-----|---|--|---|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Perpustakaan Kelurahan " Cahaya" Jalan Abdul Muis RW.007 Perumnas 3 Kelurahan Tanjung Hulu | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan buku dan rak untuk perpustakaan di Perpustakaan Kelurahan " Cahaya" Jalan Abdul Muis RW.007 Perumnas 3 | |
| 5. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | TPA Mesjid Nurul Hidayah Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Sungai Raya Lestari RT. 003/RW. 009 Kelurahan Bangka Belitung Darat | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan buku | |
| 6. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Perpustakaan "Harapan Cerdas" di RT1 RW2; dan Perpustakaan Kantor Kelurahan Bansir Laut | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Buku dan Rak Buku | |

| | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|--|----------------------|--|
| | 7. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Perpustakaan Suara Al Ihtisan Gg. Teratai RT. 003/RW. 007 Kelurahan Bangka Belitung Laut | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |
| | 8. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Pendopo Tepi Sungai Kapuas (Bang BOY) Gg. H. Hasan RT. 003/RW. 005, Kota Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Laut | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |
| | 9. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | TPQ Hasanuddin Jl. Parit. H. Husin 2 Komp. Disbun 1 B RT. 001/RW. 013 Kelurahan Bangka Belitung Darat | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|--|----------------------|--|
| | 10. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama 2 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Bangka Belitung Darat | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |
| | 11. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Posyandu di Kelurahan Bangka Belitung Laut | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |
| | 12. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | TPQ Al-Fattah Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Al-Huda Kelurahan Bangka Belitung Darat | Jumlah perpustakaan masyarakat yang di tingkatkan layanan taman bacaannya | | Bantuan Rak dan Buku | |
| | 13. | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota | Pondok Penyao RT. 001/RW. 015, Kota Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Laut | | | Bantuan Rak dan Buku | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan: 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; 2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan 3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh karena itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatankegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Kebijakan Nasional tentang Kearsipan sudah diamankan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap Pemerintahan Daerah wajib

melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan arsip. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengelolaan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk kepentingan penyelamatan catatan sejarah suatu daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari catatan sejarah nasional Indonesia. Pengelolaan arsip juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelamatkan bahan bukti kinerja pemerintahan yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hak-hak keperdataan maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Untuk itu pula sejak tahun 2007, penyelenggaraan kearsipan dinyatakan sebagai urusan wajib bagi daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian amanat Undang-Undang dan peraturan perundangundangan lainnya pada skala nasional kurang cukup memadai untuk mengantar sampai pada implementasinya. Sesuai dengan tingkatan urusan yang harus diatur dan karakteristik masing-masing daerah, peraturan perundangundangan bidang kearsipan harus ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih bersifat implementatif di tingkat daerah. Bukan hanya karena amanat peraturan perundangundangan sehingga kegiatan kearsipan dilaksanakan, tertib arsip di suatu tatanan pemerintahan semakin dirasakan manfaatnya. Upaya mewujudkan tertib arsip memerlukan komitmen. Perubahan pimpinan daerah berpotensi menimbulkan fluktuasi sikap daerah terhadap penyelenggaraan kearsipan. Apabila perhatian terhadap kearsipan mengalami penurunan kembali, akan membawa risiko kembali pada ketidaktertiban arsip beserta berbagai konsekuensinya.

Komitmen daerah harus dilandasi dengan produk hukum yang dihasilkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, yang bukan hanya Kepala Daerah dan jajaran birokrasinya melainkan juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, maka amanat perundangundangan di bidang kearsipan dan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan dibangunlah Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang harus mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan Negara di masa kini dan yang akan datang. Untuk memastikan dan menjamin bahwa sistem penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diperlukan pengawasan kearsipan.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan diharapkan akan memperoleh potret penyelenggaraan kearsipan yang utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, sehingga mampu merepresentasikan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan,

yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, untuk digunakan sebagai:

1. Perencanaan dan pengambil keputusan;
2. Dukungan Pelayanan Publik;
3. Pelindungan terhadap hak keperdataan rakyat (misal; Buku nikah/Akta nikah, Kartu Keluarga, Ijazah, sertifikat);
4. Bahan Pertanggungjawaban;
5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual;
6. Pembelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
7. Identitas dari Memori Kolektif;
8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai simpul pemersatu bangsa);
9. Sebagai Alat Bukti Hukum.

Dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diperlukan:

1. Kebijakan (TND, Klasifikasi Arsip, SKKAD, JRA dan kebijakan pengelolaan arsip);
2. Arsiparis dan SDM kearsipan;
3. Pengelolaan Arsip;
4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan;
5. Aplikasi Pengelolaan Arsip

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah tahap perumusan sasaran startegis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama Tiga tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan memperjelas yang ingin dicapai.

Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak 2024-2026 adalah sesuai dengan **Sasaran RPJMD Kota Pontinak nomor 13 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam jangka waktu satu tahun, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah:

1. **Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan;**
Dengan indikatornya Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
2. **Meningkatnya pengelolaan arsip daerah;**
Dengan indikatornya Indeks Kearsipan.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan startegis yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | FORMULA/ CARA PENGUKURAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Survey Pelayanan Publik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | | Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan | Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | = jumlah kunjungan ke Perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun | 85% | 85% | 85% |
| | | Meningkatnya pengelolaan arsip daerah | Indeks Kearsipan | = (60% x nilai pengawasan eksternal) + (40% x nilai pengawasan internal) | CC (cukup) | CC (cukup) | B (baik) |

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, capaian target ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Rencana kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Adapun jumlah program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun anggaran 2024 berjumlah 4 Program, 15 Kegiatan, dan 43 Subkegiatan. Adapun Program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan arsip;
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Kegiatannya yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota
9. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota
10. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
11. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota
12. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota
13. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun

14. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alihmedia Kab/Kota
15. Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang

Sub kegiatannya, yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
8. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
25. Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota;
26. Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan;
27. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota;
28. Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka;
29. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat;

30. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota;
31. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
32. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
33. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
34. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota;
35. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis;
36. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JKN;
37. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang dimiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
38. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang dimiliki Retensi dibawah 10 tahun;
39. Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip;
40. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaatan Penjaminan Keabsahan Arsip;
41. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang;
42. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang;
43. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2024 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|--|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | | | 9 | | |
| | Non Urusan | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 19,674,950,000 | | | 8,874,018,000 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan | Disperpusip | 95% | 7,600,630,600 | | | 95% | 7,835,603,600 |
| | 01 PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | 100% | 33,400,000 | | | 100% | 33,400,000 |
| | 02 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 8 Dokumen | 14,400,000 | | | 8 Dokumen | 14,400,000 |
| | 03 2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 dokumen | 5,500,000 | | | 1 dokumen | 5,500,000 |
| 1 | 02 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 dokumen | 5,500,000 | | | 1 dokumen | 5,500,000 |
| | 4 Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 19 laporan | 8,000,000 | | | 19 laporan | 8,000,000 |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | | 100 persen | 6,400,341,000 | | | 100 persen | 6,436,809,000 |
| | 01 5 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 43 orang | 6,233,981,000 | | | 43 orang | 6,270,449,000 |
| | 02 6 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 1 dokumen | 156,360,000 | | | 1 dokumen | 156,360,000 |
| | 7 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | | 7 dokumen | 10,000,000 | | | 7 dokumen | 10,000,000 |
| | 01 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah | | 100 persen | 87,510,000 | | | 100 persen | 87,510,000 |
| | 02 8 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | | 2 paket | 57,510,000 | | | 2 paket | 57,510,000 |
| 1 | 04 9 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | 5 orang | 30,000,000 | | | 5 orang | 30,000,000 |
| 1 | 06 01 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Prosentase realisasi penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah | | 100 persen | 243,476,200 | | | 100 persen | 243,476,200 |
| | 02 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | | 1 paket | 14,008,200 | | | 1 paket | 14,008,200 |
| | 03 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | 1 paket | 50,339,200 | | | 1 paket | 50,339,200 |

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2024 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | | | 9 | | | |
| | 04 | 12 | Penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 paket | 20,000,000 | | 1 paket | 20,000,000 | |
| 1 | 07 | 01 | 13 | Penyediaan bahan logistik kantor | jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan | 1 paket | 40,000,000 | | 1 paket | 40,000,000 |
| | | | 14 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 46,128,800 | | 1 paket | 46,128,800 |
| | | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 13,000,000 | | 1 paket | 13,000,000 |
| 1 | 04 | 02 | 16 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 6 laporan | 60,000,000 | | 6 laporan | 60,000,000 |
| | | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | 150,000,000 | | 100 persen | 200,000,000 |
| | | 01 | 17 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 56 unit | 150,000,000 | | 56 unit | 200,000,000 |
| | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | 100 persen | 403,363,600 | | 100 persen | 585,584,400 |
| | | 01 | 18 | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 laporan | 1,200,000 | | 1 laporan | 1,200,000 |
| | | | 19 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 4 laporan | 225,000,000 | | 4 laporan | 250,000,000 |
| | | | 20 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 laporan | 10,000,000 | | 1 laporan | 10,000,000 |
| | | 02 | 21 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 laporan | 167,163,600 | | 5 laporan | 324,384,400 |
| | | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | 100 persen | 282,539,800 | | 100 persen | 248,824,000 |
| | | 01 | 22 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 140,320,000 | | 5 unit | 140,320,000 |
| | | | 23 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 72 unit | 65,297,350 | | 72 unit | 65,297,350 |
| | | | 24 | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 unit | 76,922,450 | | 2 unit | 43,206,650 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| 2 | 01 | | I. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | Ketercukupan koleksi perpustakaan | 150 judul (300 eksemplar) | | | 150 judul (300 eksemplar) | |
| 2 | 01 | 01 | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | 36.30% | 11,755,319,400 | | 36.30% | 717,814,400 |
| | | | PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota | 100 persen | 500,000,000 | | 100 persen | 500,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2024 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|--|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | | | 9 | | |
| | 25 | Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota | jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya | | 6 perpustakaan | 219,069,400 | | 6 perpustakaan | 219,069,400 |
| | 26 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan | jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | | 6 perpustakaan | 134,680,600 | | 6 perpustakaan | 134,680,600 |
| | 02 | 27 Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota | | 40 orang | 50,000,000 | | 40 orang | 50,000,000 |
| | 28 | Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | | 300 eksemplar | 96,250,000 | | 300 eksemplar | 96,250,000 |
| | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota | | 100 persen | 11,255,319,400 | | 100 persen | 217,814,400 |
| | 30 | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat | jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | | 6 lokus | 105,319,400 | | 6 lokus | 105,319,400 |
| | 31 | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota | | 1 perpustakaan | 150,000,000 | | 1 perpustakaan | 112,495,000 |
| | 32 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | | 6 orang | 11,000,000,000 | | 6 orang | 0.00 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | |
| | | II. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat Ketersediaan Arsip | | 74 persen | 291,000,000 | | 74 persen | 292,600,000 |
| | | Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah, kelurahan, dan ormas | | 32 persen | 177,000,000 | | 32 persen | 178,600,000 |
| | 03 | 33 Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | | 20 berkas | 85,000,000 | | 20 berkas | 85,000,000 |
| | 04 | 34 Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis | jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | | 20 berkas | 32,000,000 | | 20 berkas | 33,600,000 |
| | 35 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota | | 10 laporan | 60,000,000 | | 10 laporan | 60,000,000 |
| | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota | | 100 persen | 110,000,000 | | 100 persen | 110,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2024 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|--|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | | | 9 | | |
| | 36 Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | | 5000 arsip | 110,000,000 | | | 5000 arsip | 110,000,000 |
| | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak | | 100 persen | 4,000,000 | | | 100 persen | 4,000,000 |
| | 37 Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN | jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN | | 10 pengguna | 4,000,000 | | | 10 pengguna | 4,000,000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | | 50 persen | 28,000,000 | | | 50 persen | 28,000,000 |
| | Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota | Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota | | 100 persen | 6,500,000 | | | 100 persen | 6,500,000 |
| | 38 Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip. | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | 1 arsip | 2,000,000 | | | 1 arsip | 2,000,000 |
| | 39 Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip | | 1 arsip | 4,500,000 | | | 1 arsip | 4,500,000 |
| | 02 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | | 100 persen | 11,000,000 | | | 100 persen | 11,000,000 |
| | 40 Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun. | jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun | | 300 arsip | 6,000,000 | | | 300 arsip | 6,000,000 |
| | 41 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun | jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan | | 6 berkas | 5,000,000 | | | 6 berkas | 5,000,000 |
| | Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang | Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang | | 100 persen | 10,500,000 | | | 100 persen | 10,500,000 |
| | 42 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang. | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | 1 arsip | 3,500,000 | | | 1 arsip | 3,500,000 |
| | 43 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | 1 arsip | 3,500,000 | | | 1 arsip | 3,500,000 |
| | 44 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | | 1 arsip | 3,500,000 | | | 1 arsip | 3,500,000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Kota Pontianak dijabarkan dalam Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|-------------------------|--|---|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | 19.674.950.000,00 | | | | | | | 8.874.018.000,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 19.674.950.000,00 | | | | | | | 8.874.018.000,00 | |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 19.355.950.000,00 | | | | | | | 8.553.418.000,00 | |
| 1. | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</i> | 95 Persen | | | | 95 Persen | 7.600.630.600,00 | | | | | 95 Persen | 7.835.603.600,00 | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | - | | | | 100 persen | 33.400.000,00 | | | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 33.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | | 8 Dokumen | 14.400.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 14.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 5.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 5.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | | 19 Laporan | 8.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i> | - | | | | 100 Persen | 6.400.341.000,00 | | | - | Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | 6.436.809.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 43 Orang/bulan | 6.233.981.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 6.270.449.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 156.360.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 156.360.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i> | | | | 7 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i> | - | | | 100 persen | 87.510.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 87.510.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 2 Paket | 57.510.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 57.510.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 5 Orang | 30.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</i> | - | | | 100 Persen | 243.476.200,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 243.476.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 14.008.200,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 14.008.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 50.339.200,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 50.339.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 46.128.800,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 46.128.800,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 13.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 6 Laporan | 60.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i> | - | | | 100 Persen | 150.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 56 Unit | 150.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | - | | | 100 Persen | 403.363.600,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 585.584.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 1.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 4 Laporan | 225.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Laporan | 167.163.600,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 324.384.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | - | | | 100 Persen | 282.539.800,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 248.824.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 5 Unit | 140.320.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 140.320.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 72 Unit | 65.297.350,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 65.297.350,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|---|-----------|---|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 2 Unit | 76.922.450,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 43.206.650,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Ketercukupan tenaga perpustakaan Ketercukupan koleksi Perpustakaan | 900 Eksemplar 58,7 Persen | | | 36,3 Persen 300 Eksemplar | 11.755.319.400,00 | | | | | | 300 Eksemplar 47,5 Persen | 717.814.400,00 | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/ Kota</i> | - | | | 100 persen | 500.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 500.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i> | | | | 6 Perpustakaan | 219.069.400,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 219.069.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i> | | | | 6 Perpustakaan | 134.680.600,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 134.680.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 40 Orang | 50.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i> | | | | 300 Eksemplar | 96.250.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 96.250.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i> | - | | | 100 persen | 11.255.319.400,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 217.814.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|---|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i> | | | | 6 Lokus | 105.319.400,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 105.319.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Perpustakaan | 11.000.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i> | | | | 6 Orang | 150.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 112.495.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 319.000.000,00 | | | | | | | 320.600.000,00 | |
| 1. | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat Ketersediaan Arsip | 76 Persentase | | | 74 Persen | 291.000.000,00 | | | | | | 75 Persentase | 292.600.000,00 | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Ormas</i> | - | | | 32 persen | 177.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 178.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i> | | | | 20 Berkas | 85.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i> | | | | 20 Berkas | 32.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 33.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 10 Laporan | 60.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/ Kota</i> | - | | | 100 Persen | 110.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 110.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i> | | | | 5000 Arsip | 110.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak</i> | - | | | 100 Persen | 4.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 4.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i> | | | | 10 Pengguna | 4.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 4.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | 70 Persen | | | 50 Persen | 28.000.000,00 | | | | | | 60 Persen | 28.000.000,00 | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | <i>Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun</i> | - | | | 100 Persen | 11.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i> | | | | 300 Arsip | 6.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i> | | | | 6 Berkas | 5.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | <i>Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota</i> | - | | | 100 Persen | 6.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | - | 6.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan</i> | | | | 1 Arsip | 2.000.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 2.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</i> | | | | 1 Arsip | 4.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 4.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | <i>Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang</i> | - | | | 100 Persen | 10.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 10.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan</i> | | | | 1 Arsip | 3.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 3.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang</i> | | | | 1 Arsip | 3.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 3.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman</i> | | | | 1 Arsip | 3.500.000,00 | - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | - | | 3.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | J U M L A H | | | | | 19.674.950.000,00 | | | | | | | 8.874.018.000,00 | |

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kota.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya.

Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, Agustus 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Pontianak,



RENDRAYANI, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19780624 199703 2 004